

BERKAT KREDIT PEDE

Kelompok Tani, Ternak dan KWT Mekar Ngalyan Ngemplak Naik Kelas

KELOMPOK Tani Mekar, Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Kelompok Ternak Taruna Mandiri Ngalyan Widomartani Ngemplak Sleman berhasil mengembangkan usaha alias naik kelas sekaligus memberdayakan masyarakat berkat dukungan permodalan kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) Bank BPD DIY. Selain proaktif membantu pembiayaan untuk menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Bank BPD DIY memberikan pelatihan dan bimbingan pengelolaan atau manajemen keuangan bagi kelompok usaha.

Penggerak Kelompok Tani Mekar dan Kelompok Ternak Taruna Mandiri Ngalyan Ngemplak Minto Hartono (50) mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan permodalan yang digulirkan Bank BPD DIY melalui PEDE khususnya menyokong biaya produksi dan operasional usaha yang cukup besar.

Bank BPD DIY sudah tidak asing lagi dikenal warga Ngalyan Ngemplak Sleman dalam memberikan kemudahan pembiayaan sekaligus pendampingan atau pelatihan manajemen pengelolaan keuangan bagi kelompok maupun anggota sehingga banyak yang telah menjadi nasabah sekaligus debitur.

"Kami sangat terbantu dengan adanya permodalan dari Bank BPD DIY melalui skema kredit PEDE ini. Intinya kami sangat dipermudah dengan adanya permodalan maupun dari sisi pembayarannya. Bank BPD DIY sangat merakyat di Ngalyan Ngemplak yang dikenal sebagai Kampung Empon-empon sekaligus merupakan salah satu yang berhasil menjadi Lumbung Mataraman di DIY," tuturnya kepada KR, Kamis (24/6).

Minto mengaku anggota maupun kelompoknya banyak mendapatkan kemudahan akses dan pelayanan

biayaan hingga sistem pembayarannya yang memiliki banyak pilihan tenor atau jangka waktu sesuai kemampuan. Kelompok tani maupun kelompok ternak tersebut sudah mengakses pembiayaan dari Bank BPD DIY sejak 2007 lalu hingga sekarang ada skema kredit PEDE yang tetap dipergunakan menambah permodalan biaya produksi." Tidak hanya sekedar membantu permodalan kami, Bank BPD DIY melakukan pelatihan dan bimbingan manajemen pengelolaan keuangan bagi kelompok. Kami juga sering melibatkan Bank BPD DIY dalam kegiatan-kegiatan kelompok sehingga saling mengisi dan tetap intens" katanya.

Pria yang dinobatkan sebagai Inisiator Ekonomi Kerakyatan Sleman tersebut menuturkan kelompok usaha yang berdiri sejak 2003 ini mempunyai kelompok tani yang beranggotakan 32 orang, kelompok ternak beranggotakan 36 orang dan KWT yang memiliki 58

orang. Beberapa usaha yang dikembangkan seperti peternakan sapi dengan memiliki populasi sebanyak 135 ekor, pengelolaan Pupuk Organik Ngalyan (PON) yang diproduksikan menggunakan mikro organisme lokal yang melibatkan petani milenial dan telah dipasarkan hingga Kalimantan.

"Kami mendapatkan dua keuntungan sekaligus dari Bank BPD DIY yaitu kredit PEDE untuk modal usaha atau produksi dan pendampingan manajemen pengelolaan keuangan. Kami berharap Bank BPD DIY kontinu tetap memberikan permodalan dan pendampingan manajemen kepada kelompok usaha yang ada di desa-desa baik di Sleman maupun DIY," tandas Minto.

Ketua KWT Mekar Ngalyan Ngemplak Titik Sri Sugiantanti (39) menambahkan program kerja KWT Mekar fokus sebagai lumbung pangan masyarakat,

kampung empon-empon dan bank sampah. Untuk kegiatan usaha, pihaknya mengembangkan berbagai produk dari empon-empon atau herbal antara lain aneka camilan maupun makanan siap saji, minuman herbal seperti sirup jahe, wedang uwuh dan sebagainya hingga kosmetik herbal. Anggota KWT pun sudah dikelompokkan per RT untuk memproduksi sesuai pesanan di kampung empon-empon.

"Kredit PEDE Bank BPD DIY ini sangat terbantu dan bermanfaat sekali bagi kita untuk peningkatan produksi kelompok maupun anggota sendiri. Setidaknya ada 10 anggota kami yang mendapatkan kredit PEDE Bank BPD DIY masing-masing sebesar Rp 2,5 juta ini dipergunakan untuk membantu tambahan biaya produksi di sawah," pungkas Titik. (Ira)



Sosialisasi produk dan jasa BPD DIY di KWT Mekar Ngalyan Ngemplak.

Kandang ternak sapi Kelompok Ternak Taruna Mandiri Ngalyan Ngemplak

Kampung Empon-empon KWT Mekar Ngalyan Ngemplak

Kasus

anggaran penanganan Covid-19 tahun ini berbeda dengan tahun lalu yang sebagian besar anggaran penanganan Covid-19 berasal dari BTT karena pandemi memang tidak diprediksi terjadi sebelumnya. Akhirnya anggaran penanganan pandemi Covid-19 masuk ke dalam anggaran reguler OPD tahun ini sebab sudah bisa dirancah sebelumnya," katanya di Komplek Kepatihan, Kamis (24/6).

Beny menyampaikan penanganan Covid-19 dengan anggaran reguler tersebut juga merupakan hasil rekomendasi beberapa lembaga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua lembaga tersebut memberikan rekomendasi agar anggaran penanganan pandemi di DIY dimasukkan anggaran reguler APBD 2021 karena pandemi sudah bisa diduga sehingga tidak perlu masuk kategori BTT. Pihaknya telah berkomunikasi dengan beberapa OPD terkait yang melakukan penanganan pandemi perihal lonjakan kasus Covid-19 di DIY yang grafiknya naik signifikan beberapa hari terakhir ini.

"Kami sudah melakukan pengecekan langsung kepada OPD terkait, masih posisi aman meskipun terjadi lonjakan kasus Covid-19. Artinya, anggaran masih tersedia bila diperlukan bisa digeser aliran kasnya guna memenuhi kebutuhan yang mendesak. Ang-



Tim Pemakaman Prosedur Covid-19 TRC BPBD DIY siap bertugas.

garan penanganan Covid-19 di DIY baru terserap sekitar 20 persen sesuai kebutuhan. Kita juga masih memiliki anggaran BTT, jika mendesak bisa digunakan pula," ungkap Ptt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY ini.

Sementara angka kasus Covid-19 lagi-lagi mencetak rekor penambahan harian tertinggi, yakni 791 kasus di DIY, Kamis (24/6). Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY melaporkan dengan tingginya lonjakan kasus terinfeksi virus Korona ini membuat total jumlah kasus melonjak drastis yang tembus sebesar 55.463 kasus.

Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji mengatakan kasus sembuh di DIY bertambah sebanyak 258 kasus maka total sebanyak 46.644 kasus. Sedangkan ka-

sus meningkat pun masih bertambah signifikan sebesar 11 kasus, dengan demikian total kasus meninggal di DIY bertambah jadi 1.422 kasus dari hasil verifikasi data Dinkes Kabupaten/Kota. "Kenaikan kasus terkonfirmasi harian di DIY ini tinggi dengan rincian riwayat yaitu 613 kasus dari hasil tracing kontak kasus positif, 122 kasus periksa mandiri, 50 kasus belum ada informasi riwayat penularan serta masing-masing 3 kasus skrining karyawan kesehatan dan perjalanan luar daerah," tuturnya.

Sementara itu, di Kulonprogo, kegiatan training dan fasilitator di tempat wisata Ndolan Deso, Kapanewon Kalibawang dihentikan, setelah 3 fasilitator terpapar Covid-19. Puskesmas Kalibawang dan Dinas Kesehatan, Kamis (24/6) kemudian melakukan swab 70 orang yang merupakan peserta training dan

fasilitator."Karena didapati tiga positif, maka tindakan yang dilakukan adalah bagi yang positif dilakukan isolasi di shelter di luar Kulonprogo dan satu orang dikembalikan di tempat asalnya dengan protokol kesehatan. Sedangkan anggota/peserta yang lainnya dan pengelola objek tersebut dilakukan karantina," terang drg Banning Rahayujati MKes Juru Bicara Gugus Tugas Kabupaten Kulonprogo, Kamis (24/6). Dikatakan Banning, objek wisata tersebut dikarantina, dan Kamis (24/6) ini merupakan hari kelima maka dilakukan tes ulang. Sebelumnya peserta sudah dilakukan tes antigen diibayai oleh lembaga yang mengadakan pelatihan. Selanjutnya sesuai protokol yang ada pada hari kelima yang negatif harus diulang dengan tes PCR sebelum mereka dilepas dari karantina. (Ria/Ira/Wid)-d

Sambungan hal 1

PJJ Jadikan Anak Kurang Disiplin

JAKARTA (KR) - Pemerintah mengizinkan sekolah tatap muka terbatas (PTM) untuk daerah zona hijau. "Sekali lagi kita saat ini kondisinya memang fluktuatif. Dan selanjutnya pembelajaran tatap muka terbatas didorong untuk daerah yang aman, ada dalam zona hijau, untuk dapat melaksanakan PTM terbatas," kata Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih dalam acara diskusi virtual Apa Kabar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Kamis (24/6).

Sri mengatakan pembukaan sekolah harus disinkronkan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang berlaku di desa hingga kelurahan.

Untuk sekolah di zona merah tidak boleh melakukan PTM. Namun pelaksanaan PTM didorong untuk sekolah yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan dinilai aman dari penularan Covid-19.

Selama PJJ diselenggarakan akibat pandemi Covid-19, Sri mendapati banyak keluhan dan kesulitan yang dialami guru, siswa hingga orang tua.

Sri mengakui guru sulit mengelola PJJ dan terlalu fokus pada penuntasan kurikulum. Guru juga mengeluhkan waktu be-

jar yang minim dan sulit berkomunikasi dengan orang tua.

Sementara orang tua, banyak yang tidak mampu memfasilitasi anaknya belajar dari rumah. Banyak pula orang tua yang gelisah terhadap pergeseran perilaku anak selama PJJ berlangsung.

"Kedisiplinannya menjadi bergeser. Kebiasaan bangun pagi untuk sekolah, sekarang anak-anak bangun siang. Ini banyak dikeluhkan orang tua," tuturnya.

Kemudian di sisi siswa, Sri mengatakan banyak kesulitan yang didapati dalam memahami pembelajaran yang dilakukan jarak jauh. Ini berlaku bagi PJJ daring maupun luring.

Meskipun sekolah didorong segera melaksanakan PTM, ia menegaskan terdapat banyak persyaratan yang perlu dipenuhi sekolah sebelum membuka kegiatan belajar di kelas.

Beberapa di antaranya termasuk menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan, standar operasional prosedur (SOP) jalannya pembelajaran, hingga pemetaan penyakit dan keadaan seluruh warga sekolah. "Bapak ibu guru diprioritaskan mengajar PTM yang sudah dapat vaksin. Kalau ada anak dan orang tua komorbid, dianjurkan tidak PTM," tambah Sri. (Ati)-f

Ditutup

Penutupan untuk area candi, sedangkan di area taman (Zona II) tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, supaya tidak buka tutup-buka itu.

"Kalau buka tutup-buka tutup itu akan sulit untuk menjaga ekosistem. Jadi

kami buka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan kami juga menerapkan kuota pengunjung yang diturunkan lagi, hanya sekitar 25 persen sesuai anjuran yang ada," katanya.

Pihaknya betul-betul ingin mendukung jangan sampai penyebaran Covid-19 ini tidak tertangani, tetapi ekosistem wisatawan tetap terjaga. "Jadi kami buka bukan mengharapkan pengunjung hadir dalam jumlah yang banyak, tetapi untuk menjaga ekosistem ini tetap hidup, caranya penerapan protokol kesehatan harus ketat," katanya. (Dev/Ant)-f

Sambungan hal 1

Desa

kebangkitan ekonomi banyak ditopang oleh desa wisata.

Menurut Sandi desa wisata menjadi andalan pemerintah dalam mendongkrak pariwisata di masa pandemi Covid-19. Melalui desa wisata ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Desa wisata di DIY sudah terlihat keandalannya setelah menyumbangkan 3 desa wisata dalam pemberian sertifikasi dan penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2 Maret 2021. Desa Wisata Jatimulyo Kulonprogo; Desa Wisata Nglanggeran Gunungkidul dan Desa Wisata Pentingsari Sleman masuk dalam 16 Desa Wisata se-Indonesia yang memperoleh penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan sebagai upaya mendorong *quality tourism*. Penerapan standar berkelanjutan berfokus kepada 3 aspek keberlanjutan, yakni sosial, lingkungan dan ekonomi di desa wisata. Melalui program sertifikasi desa wisata berke-

lanjutan diharapkan desa wisata di Indonesia dapat lebih berkualitas, lebih kredibel, dan mampu berkolaborasi serta bersaing secara domestik dan internasional.

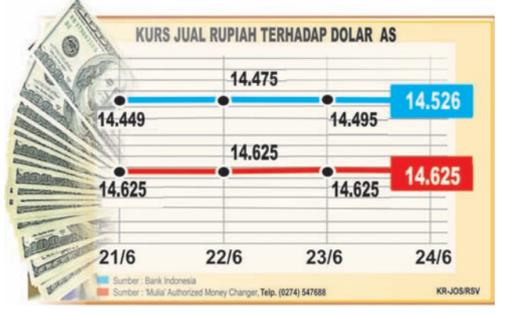
Desa wisata telah terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan untuk pelestarian lingkungan. Apalagi peaih penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan ini juga memprioritaskan aspek kebersihan kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan sehingga memperoleh sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability). Wisatawan pasti memilih desa wisata bersertifikat CHSE. Dan Menteri Perakraf optimis desa wisata akan bisa menjadi *pandemic winner* seiring dengan perubahan tren wisata pandemi.

Desa wisata direncanakan sebagai program unggulan untuk membangkitkan semangat kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang langsung menyentuh ekonomi masyarakat (Kemenparekraf, 30/April/2021). Segmentasi pariwisata ke depan diyakini akan lebih mengarah kepada *personalize, customize, localize* dan *smaller in size*. *Personalize* diartikan wisatawan akan lebih memilih jenis pari-

wisata pribadi atau hanya bersama keluarga. *Customize* adalah berwisata dengan pilihan minat khusus seperti wisata berbasis alam atau budaya. *Localize* yakni memilih destinasi yang jaraknya tidak terlalu jauh atau wisata lokal. Sedangkan *smaller in size* adalah pariwisata dengan jumlah pengunjung di setiap destinasi wisata yang tidak terlalu masif.

Ketiga kategori tersebut ada di desa wisata, terutama desa wisata bersertifikasi CHSE dan desa wisata berkelanjutan. Contohnya di Desa Wisata Nglanggeran pengunjung dapat *quality tourism* dengan jumlah kecil sambil belajar budidaya kakao dan produksi coklat. Di Desa Wisata Pentingsari pengunjung dapat belajar budaya desa berikut keramahan tamahan warga desa yang masih terjaga. Di Desa Wisata Jatimulyo pengunjung selain berwisata alam menikmati air terjun juga dapat mengamati 105 jenis burung liar yang terjaga di desa ramah burung ini.

Wisata di desa wisata berkelanjutan dapat menjadi *immune booster* bagi jiwa raga di masa pandemi ini. (Penulis adalah pegiat *ecotourism*, Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa J-f



Prakiraan Cuaca						Jumat, 25 Juni 2021	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban	
Bantul					24-31	60-95	
Sleman					23-31	65-95	
Wates					24-31	60-95	
Wonosari					23-31	65-95	
Yogyakarta					23-31	65-95	

Afrinia Lisditya Permatasari S.Si., M.Sc.
Dosen Prodi Geografi Universitas AMIKOM Yogyakarta

PENDIDIKAN merupakan salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Tahun ajaran baru, menjadi suatu hal yang sangat penting bagi para peserta didik dan orang tua, baik dari level Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menerapkan sistem

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi dalam Sistem Zonasi Sekolah

zonasi. Istilah zonasi mulai digunakan dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan sistem zonasi (khususnya sekolah negeri) disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu. Sistem zonasi diterapkan untuk mempermudah peserta didik dalam memilih lokasi sekolah yang dekat

dengan domisilinya. Hal ini tentunya membuat semua sekolah harus menyiapkan mutu yang sama dengan sekolah favorit dan unggulan yang menjadi idaman bagi para peserta didik.

Bagaimanakah sistem zonasi ini jika dikaitkan dengan pandangan ilmu geografi? Dalam ilmu geografi, terdapat tiga pendekatan utama yaitu pendekatan spasial, pendekatan lingkungan dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan spasial merupakan ciri khas yang membedakan ilmu geografi dengan lainnya. Menurut Nursid Suraatmadja (1981) pendekatan spasial terdiri dari pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia dan pendekatan regional. Dalam mempelajari pendekatan spasial, diperlukan suatu Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat mengelola data yang memiliki informasi spasial (berreferensi keruangan). SIG

merupakan sistem informasi yang mengelola dan memproses data spasial (keruangan), atau dalam artian lain yaitu sistem yang memiliki struktur yang dapat untuk membuat, menyimpan, mengelola serta dapat menyajikan informasi dalam bentuk peta geografis, seperti data koordinat lokasi suatu tempat dan lain sebagainya. Aplikasi SIG pada saat ini banyak digunakan atau dipublikasikan melalui internet. Salah satunya yaitu web-based GIS atau lebih dikenal dengan sebutan WebGIS. Karena berbasis website maka aplikasi ini membutuhkan browser dan internet untuk menjalankannya. WebGIS dapat dibuat berdasarkan kebutuhan sesuai bidang yang diinginkan, salah satunya adalah pembuatan WebGIS dalam bidang pendidikan yang dapat digunakan sebagai pemetaan sekolah yang tersebar di suatu wilayah. WebGIS nantinya dapat digunakan sebagai

panduan masyarakat khususnya orang tua dalam mencari lokasi persebaran serta informasi mengenai sekolah yang paling dekat dengan domisili peserta didik.

Salah satu metode dalam WebGIS yang dapat digunakan yaitu dengan radius jarak. Metode yang digunakan adalah analisis buffering. Analisis buffering memiliki keunggulan yaitu dapat mengidentifikasi daerah sehingga mendapatkan cakupan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek berdasarkan radius sehingga menghasilkan poligon di sekitar objek. Dengan metode tersebut, maka para peserta didik dapat menentukan zonasi yang berbasis web, dapat memetakan dan menentukan zonasi jarak sekolah dengan memanfaatkan beberapa filter pencarian seperti alamat, jarak buffer, dan menentukan posisi user. Dengan demikian para orang tua dapat terbantu

untuk menentukan tujuan sekolah sesuai dengan zonasi tempat domisili mereka.

Sistem zonasi tentunya mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan. Namun demikian, dengan adanya SIG dapat membantu para orang tua untuk mempertimbangkan sekolah yang akan menjadi tujuan mereka. Karena sistem zonasi ini dibuat untuk meratakan zona level sekolah. Sehingga tidak hanya sekolah favorit dan unggulan saja yang akan menjadi primadona bagi para peserta didik. Pemerataan pendidikan menjadi hal yang diharapkan dapat menghilangkan paradigma yang sudah berkembang di masyarakat. Sehingga semua sekolah dapat memiliki kesempatan untuk menjadi sekolah yang unggul. Dengan pertimbangan jarak dari domisili para peserta didik. (*)

